

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Persepsi publik terhadap isi film dokumenter “Dirty Vote” yang menceritakan tentang gambaran kecurangan dalam pemilihan umum tidak dapat diabaikan karena publik sebagai salah satu indikator krusial dalam menilai keberhasilan atau kegagalan proses pemilihan umum. Persepsi masyarakat terhadap integritas pemilihan umum mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem demokrasi yang sedang berjalan.

Penyelenggaraan pemilihan umum dalam pemilihan Kepala Daerah berperan dalam proses pengalihan kekuasaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum harus mempunyai kredibilitas yang terpercaya dihadapan masyarakat bahwa penyelenggara mampu mandiri, akuntabel, kredibel, dan berintegritas dalam mewujudkan Pilkada berkualitas (Rahayu & Putu, 2020, pp. 31-37).

Pemilihan umum menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan negara. Pada setiap pemilihan umum, berbagai mekanisme dan aturan diterapkan untuk memastikan kelancaran dan keadilan proses pemilihan. Akan tetapi, kelancaran yang diharapkan sangat berbeda dengan praktiknya dilapangan karena sering kali diiringi oleh potensi terjadinya kecurangan pemilihan umum.

Kecurangan dalam pemilihan umum dapat menghancurkan esensi demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Kecurangan tersebut dapat mencakup politik uang hingga pemalsuan hasil suara. Menyikapi hal tersebut, publik menjadi semakin kritis terhadap potensi kecurangan pemilihan umum terutama dengan semakin mudahnya akses informasi melalui media sosial dan *platform online*.

Persepsi publik terkait potensi adanya kecurangan pemilihan umum yang mana partai politik dianggap paling potensial melakukan kecurangan. Persepsi ini didukung oleh hasil survei LSI, bahwa sebanyak 17,1% responden menyatakan partai politik menjadi pihak yang paling berpotensi melakukan kecurangan ([www.sindonews.com](http://www.sindonews.com)).

Kecurangan dalam pemilihan umum 2024 akan terjadi melihat dari hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa sebesar 50,2% responden dari total responden meyakini potensi terjadinya kecurangan ([www.sindonews.com](http://www.sindonews.com)). Hasil survei ini diperkuat oleh laporan ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa diungkapkan 3 (tiga) potensi kecurangan, *pertama* pembagian sisa surat undangan untuk memilih yang dibagikan kepada mereka yang tidak berhak, *kedua* memindahkan suara calon legislator kepada calon lain dalam satu partai, dan *ketiga* jual beli rekapitulasi suara, utamanya bagi partai politik yang tidak lolos ([www.mkri.id](http://www.mkri.id)).

Film dokumenter “Dirty Vote” yang dirilis pada beberapa hari menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024 lalu ramai diperbincangkan publik. Film dokumenter yang digarap oleh jurnalis sekaligus kritikus Dhandy

Dwi Laksono ini mengungkap berbagai bentuk kecurangan sepanjang pemilihan umum dengan menggandeng 3 (tiga) orang ahli tata hukum negara. Sejak dirilis pada 11 Februari 2024 dengan durasi film 1 jam 57 menit ini menuai banyak respon publik dan telah ditonton 7 juta penonton dalam waktu 24 jam perilisannya.

“Dirty Vote” bukan sekadar film dokumenter biasa, namun sebuah pengungkapan yang menggetarkan tentang dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2024. Persepsi publik sangat tertarik untuk membahas film ini dikarenakan di dalam film terdapat bukti-bukti nyata kecurangan pemilihan umum, ketidaknetralan ASN dan pemerintah, serta penyelewengan konstitusi dijelaskan secara lengkap dan informatif.

Melihat dari beberapa komentar publik terkait film dokumenter “Dirty Vote” melalui akun officialnya di YouTube, yaitu:

Berdasarkan banyaknya komentar yang masuk di akun sosial media YouTube terkait film dokumenter tersebut, dapat disimpulkan bahwa publik sangat antusias dan terlibat aktif dalam memperhatikan setiap tindakan yang terjadi dalam pemilihan umum 2024. Secara umum, komentar yang muncul mencerminkan adanya pro dan kontra di antara publik terhadap isi film yang menyoroti dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2024. Hal ini menunjukkan bahwa film tersebut berhasil memancing diskusi dan perhatian yang signifikan dari masyarakat.

Munculnya persepsi publik terhadap isu politik dalam film dokumenter “Dirty Vote” terbentuknya pihak yang pro dan kontra terhadap isi film. Salah

satu persepsi publik yang terlontar dari pihak kontra adalah terkait pembuatan film yang terkesan memihak sekelompok tertentu dan menjatuhkan kelompok lainnya. Sedangkan, tanggapan persepsi publik yang pro menilai bahwa film ini penting sebagai sarana edukasi politik pada publik dalam pemilihan umum.

Film dokumenter “Dirty Vote” sebagai bagian dari pendidikan politik yang mana dengan memanfaatkan data yang telah beredar di publik bahwa konflik kepentingan yang dapat berujung pada kecurangan dalam rangkaian pemilihan presiden. Tidak hanya itu, bukan saja menjadi pengingat terhadap pihak-pihak yang hendak melakukan kecurangan namun juga sebagai pendidikan politik bagi masyarakat ([www.bbc.com](http://www.bbc.com)).

Konflik politik sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok, ataupun organisasi dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah (lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Konflik politik adalah kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, serta perilaku penguasa, segenap aturan, struktur dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipasi politik (Surbakti, 2010, p. 93).

Persoalan tentang pro dan kontra persepsi publik berkaitan dengan lemahnya teori legitimasi sehingga perlu penguatan untuk kelembagaan dengan cara berkolaborasi. Teori institusional atau teori kelembagaan adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi (Dhani, 2022, p. 101).

Penguatan teori institusional meyakini bahwa keteraturan dapat dicapai melalui institusi. Hubungan keagenan sektor pemerintah tidak dapat didekati sepenuhnya dengan pendekatan keagenan konvensional karena beberapa pertimbangan seperti adanya perbedaan ideologi organisasi yang ada. Sementara itu, ideologi yang terkandung dalam teori keagenan berdasarkan fakta yang ada karena terdapat unsur kapitalisme.

Persepsi diartikan sebagai upaya menerjemahkan dan memahami kesan yang akan terjadi (Kreitner & Angelo, 2005, p. 208). Di dalam teori persepsi akan ada hubungan usaha yang dilakukan saat beberapa individu-individu mengamati perilaku untuk menentukan apakah tindakan tersebut disebabkan faktor internal atau eksternal (Dhani, 2022, p. 101). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pandangan individu yang menjadikannya kekuatan pendorong yang kuat untuk bertindak.

Politik sebagai cara bertindak dalam menangani setiap persoalan publik atas kekuasaan pada sistem pemerintah. Politik merupakan segala sesuatu dan tindakan baik kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, p. 886). Hal tersebut didukung oleh Surbakti, bahwa politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara atau masyarakat untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama (Surbakti, 2010, p. 2). Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam fenomena masalah tersebut melalui komunikasi digital dengan judul

“Persepsi Publik terhadap Isu Politik dalam Film Dokumenter Dirty Vote pada YouTube Channel @DIRTYVOE.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Makro**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana “Persepsi Publik terhadap Isu Politik dalam Film Dokumenter “Dirty Vote” pada youtube channel @Dirtyvote?

### **1.2.2 Rumusan Masalah Mikro**

1. Bagaimana dasar pengetahuan (**kognitif**) publik terhadap isu politik pada film dokumenter “Dirty Vote”?
2. Bagaimana perasaan (**afektif**) publik terhadap isu politik pada film dokumenter “Dirty Vote”?
3. Bagaimana tingkah laku (**konatif**) publik terhadap isu politik pada film dokumenter “Dirty Vote”?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang telah di rumuskan mengenai “Persepsi Publik terhadap Isu Politik dalam Film Dokumenter “Dirty Vote”.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah mikro di atas, maka tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah mikro tersebut yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dasar pengetahuan (**kognitif**) publik terhadap isu politik pada film dokumenter “Dirty Vote”.
2. Untuk mendeskripsikan perasaan (**afektif**) publik terhadap isu politik pada film dokumenter “Dirty Vote”.
3. Untuk mendeskripsikan tingkah laku (**konatif**) publik terhadap isu politik pada film dokumenter “Dirty Vote”.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu komunikasi.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara langsung bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan terkini dalam masalah politik di Indonesia.

2. Bagi Lembaga Akademik

Sebagai tambahan informasi dan sumbangan pemikiran terkait isu politik di Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dalam peningkatan kualitas pemilihan umum di Indonesia.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan persepsi publik terhadap isu politik